

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu ukuran utama kemakmuran suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Tingkat kesejahteraan warga suatu negara meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Tolok ukur makro yang berguna untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian di suatu daerah, atau besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah, disebut dengan produk regional bruto (PDRB). Aktivitas perekonomian daerah berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada peningkatan tahunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga dikenal sebagai output agregat, yang mencakup barang dan jasa (Weya,2015).

Faktor lain yang sangat nyata yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi mengurangi tingkat tabungan masyarakat dan menghambat akumulasi modal yang dapat dikumpulkan di suatu wilayah. Tidak adanya akumulasi modal di suatu wilayah atau daerah menyebabkan investasi dalam kegiatan perekonomian rendah (Rahmadi & Parmadi,2019). Kemiskinan saat ini memengaruhi upaya di masa depan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat kemiskinan di daerah tersebut merupakan komponen penting dalam menilai kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Angka kemiskinan adalah jumlah orang yang pengeluarannya, termasuk pengeluaran non-makanan, berada di bawah garis kemiskinan.

Pembangunan manusia merupakan suatu paradigma pembangunan yang saat ini sedang dikembangkan untuk mengukue tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan standar kualitas hidup manusia di masing-masing negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas keberadaan manusia. Hal ini didasarkan pada standar ekonomi (daya beli), kesehatan, dan pendidikan. Menurut Sari dan Fatah (2014) modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu komponen penting yang mendorong perekonomian untuk berkembang. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengambil dan mengendalikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk sumber-sumber kelembagaan dan teknologi, sebagai alat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu wilayah yang pada akhirnya akan menghasilkan kemajuan bangsa manusia harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Pembangunan manusia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian tujuan jangka panjang suatu masyarakat yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan (Putra, 2015).

Jika mempertimbangkan krisis ekonomi di masa lalu, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan PDB per kapita meningkat dari \$807 pada tahun 2000 menjadi \$3,877 pada tahun 2018 (Bank Dunia, 2019). PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia meningkat sebesar 5,31% secara keseluruhan pada tahun 2022 menjadi Rp11.710,4 triliun atas dasar harga konstan, dengan IPM sebesar 73,37. Menjadi provinsi yang memiliki kompleksitas pertumbuhan ekonomi, yaitu dari besarnya jumlah penduduk, besarnya sentra industri, pertambangan dan jasa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Jawa Barat pula menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa, mengalahkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta seperti terlihat pada grafik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Jawa Barat meningkat sebesar 5,45% pada tahun 2022, dengan nilai IPM sebesar 73,12. Produk Domestik Regional

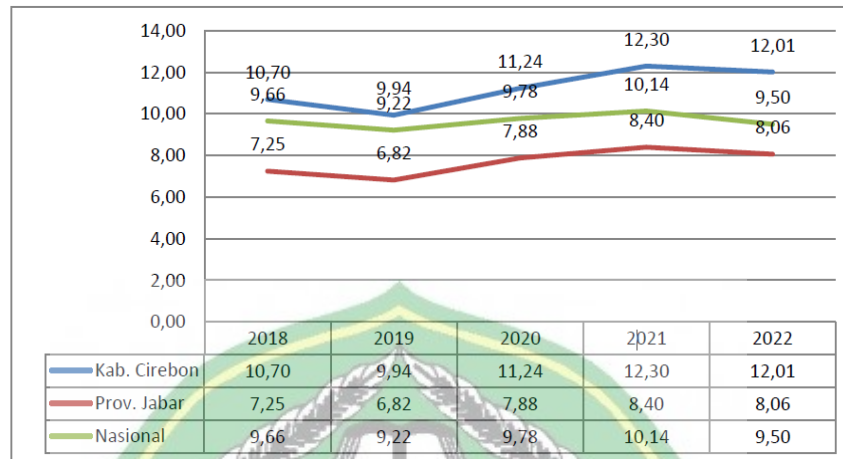
Bruto (PDRB) Jawa Barat meningkat dari 1,507,7 triliun pada tahun 2021 menjadi 1,589,9 triliun pada tahun 2022, dengan harga konstan.

Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang terletak di Jawa Barat, wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di wilayah utaranya. Dengan potensi yang luar biasa dan letak yang menguntungkan, seharusnya ini dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi Kabupaten Cirebon dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena berada di dekat Laut Jawa dan di jalan pantura, salah satu pintu masuk ke wilayah Jawa Tengah, lokasi ini sangat penting untuk kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan Kabupaten Cirebon.

Kenyataannya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon sering terhambat oleh berbagai kendala baik internal maupun eksternal, yang menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah ini belum optimal. Salah satu masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah kekurangan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja berkualitas. Meskipun lokasinya menguntungkan, jalan, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini tentunya berdampak pada produktivitas dan efisiensi kegiatan perekonomian, khususnya pada sektor perdagangan dan manufaktur. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon penambahan penduduk yang terus menerus meningkat dari 2.189.785 jiwa pada tahun 2019 menjadi 2.270.621 jiwa pada tahun 2020 dan belum optimalnya pembangunan manusia, menjadikan Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari permasalahan pengangguran karena minimnya lapangan kerja. Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon masih tinggi, meskipun turun menjadi 8,11% pada tahun 2022 dari 11,3% pada triwulan sebelumnya. Hal ini jika tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan dampak permasalahan ekonomi seperti kemiskinan.

Tercatat sebanyak 90.118 dari total angkatan kerja 1.110.529 jiwa merupakan pengangguran terbuka dan sebanyak 266.100 dari total 2.315.417 jiwa di Kabupaten Cirebon masuk kedalam kategori miskin (RPJMD 2019-2024). Jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan diperkirakan akan menurun pada tahun 2022. Di Kabupaten Cirebon, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 271.020 jiwa pada tahun 2021 atau 12,30%, dan turun menjadi 266.100 jiwa pada tahun 2022 atau 12,01%. Namun, meskipun begitu angka tersebut masih termasuk

tinggi jika dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 8,40% pada tahun 2021 dan 8,06% pada tahun 2022, sedangkan untuk nasional berada diangka 10,14% dan 9,50% pada tahun 2021 dan 2022. Jika tidak dibenahi dengan baik, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 1.1**  
**Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022**

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024 Kab. Cirebon*

Perekonomian Kabupaten Cirebon menurun tajam dari tahun 2016 hingga 2019. Pertumbuhan mencapai 4,68% pada tahun 2019 dan bahkan turun 1,08 % pada tahun 2020. Statistik pertumbuhan ekonomi sangat memengaruhi perekonomian Kabupaten Cirebon, jadi fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan. Selain itu, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing, LPE Kabupaten Cirebon dari 2017 hingga 2019 terus turun dari LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.



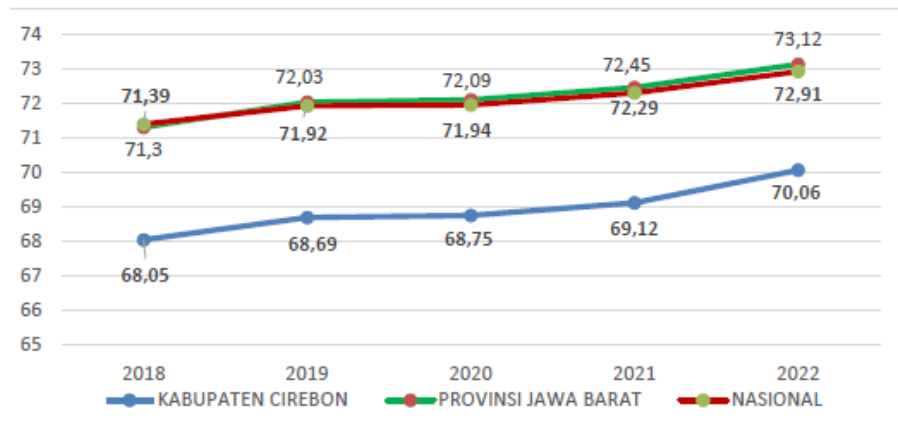
<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
Konsumsi Rumah Tangga	34,91	37,38	40,68	44,17
Konsumsi LNPRT	0,70	0,75	0,90	0,97
Konsumsi Pemerintah	3,46	3,31	3,50	3,71
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	13,52	14,06	15,17	16,26
Perubahan Inventori	1,50	1,58	1,69	1,72
Net (Ekspor-Impor)	-15,25	-15,16	-16,48	-17,65
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>38,84</b>	<b>41,92</b>	<b>45,46</b>	<b>49,19</b>

**Tabel 1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran**  
**Kabupaten Cirebon 2016-2019**

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024 Kab. Cirebon*

Berdasarkan data yang tersedia, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) diketahui mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, nilai PDRB ADHB hanya sebesar 38.840,78 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 49.561,30 miliar rupiah (BPS Kabupaten Cirebon). Nilai tambah produksi Kabupaten Cirebon telah meningkat selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, industri pengolahan tetap menjadi sektor andalan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah penggerak ekonomi utama. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap perekonomian Kabupaten Cirebon adalah penyediaan air, pengelolaan limbah, dan daur ulang, masing-masing dengan 0,11 persen.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah.



**Gambar 1.2**

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020**

*Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024 Kab. Cirebon*

Diketahui IPM Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 68,75 pada tahun 2020. Namun, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut ini, angka IPM tahun 2020 masih lebih rendah daripada angka nasional yang mencapai 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09. Data IPM selama tiga tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi.

Penghitungan IPM salah satunya dipengaruhi oleh 2 indikator pendidikan, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Nilai HLS yang semakin tinggi, menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh. Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2020 mencapai 12,25 tahun yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. Sejalan dengan HLS, nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 6,92 tahun pada tahun 2020 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 6,92 tahun atau Kelas 1 SMP semester kedua. Indeks kesehatan pun terus mengalami peningkatan ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang terus

meningkat. AHH Kabupaten Cirebon cenderung naik setiap tahun di mana pada tahun 2022 mencapai 72,47 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memilikiharapan hidup hingga usia 72-73 tahun.

Berdasarkan data diatas hal tersebut seharusnya sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon. Sebagaimana penelitian yang ditunjukkan oleh Nyoman Lilya Santika Dewi dan I Ketut Sutrisna bahwa indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat yang dimana itu sebagai tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Selanjutnya, Nabawi (2020) menyatakan bahwa nilai PDRB yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, pertumbuhan PDRB diukur sebagai pertumbuhan faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Sri Handayani, I K.G. Bendesa, dan Ni Nyoman Yuliarmi (2016) yakni bahwa PDRB mempunyai dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat” oleh Yulina Eliza (2015) menunjukkan bagaimana pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, yang dilakukan pemerintah berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari PDRB. Lalu, dari segi kemiskinan ditunjukkan dari penelitian Imanto (2020) dan Novryansyah (2018) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada. Pratama et al (2019) dalam penelitiannya pun menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata diantara wilayah tersebut, maka tingkat kemiskinan pun akan dapat berkurang.

Semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap

pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang dimana hal ini akan menekan angka kemiskinan. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Namun, nyatanya selama kurun waktu tahun 2019-2022 pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon belum pernah mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Hal ini pun yang membuat ekonomi Kabupaten Cirebon selalu dibawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat maupun nasional. Adanya perbedaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh PDRB dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimana Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai penghubung antara variabel-variabel tersebut.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih dibawah LPE di Jawa Barat
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang terus menurun dari kurun waktu 2016-2020
3. Pembangunan manusia yang masih rendah di Kabupaten Cirebon
4. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon yang masih tinggi
6. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Cirebon

#### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas, serta dapat memberikan pemahaman yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih dibawah LPE di Jawa Barat
- Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Cirebon karena kurang optimalnya dalam pembangunan manusia



#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
5. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
6. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon?
7. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon?
2. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon?
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
4. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
5. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
6. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon?

7. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel intervening di Kabupaten Cirebon?

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta sumbangan pemikiran untuk mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi, serta menambah kajian baru mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat pengalaman dan memperluas pengetahuan wawasan peneliti.

#### b) Bagi Pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi bagi pembaca.

#### c) Bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek tentang pertumbuhan ekonomi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan ini, penulis membagi lima BAB, adapun penjelasan dari tiap-tiap BAB sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, yakni teori PDRB, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dalam bab ini

terdapat juga kerangka berpikir, tinjauan pustaka yang dijadikan acuan dan pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga terdapat penyusunan hipotesis awal sebagai dugaan sementara dari penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan, operasional variabel.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian. Hasil penelitian memuat data utama, penunjang dan pelengkap yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian.

